

South Sumatra Forest Fire Management Project

HOT SPOT

Topik Utama

Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pendekatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

PPL Swakarsa dan Sukakeswan, Agen Pendamping Pengembangan Masyarakat

Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Perempuan

Peran LSM dalam Pengembangan Masyarakat Sebagai Pendamping Kelompok

Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Radio Komunitas

Mengkaji Dampak Polusi Asap



UNI EROPA



PEMDA
SUMATERA SELATAN



DEPARTEMEN
KEHUTANAN



Surat dari Co-Director

Sidang pembaca yang terhormat,

SSFFMP merasa senang hadir kembali dalam buletin Hotspot terbaru. Dalam edisi kali ini, kami mengangkat topik mengenai pengembangan masyarakat (*community development*). Pengembangan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan kebakaran untuk menekan kebakaran hutan dan lahan. Banyak kegiatan kami terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian alternatif dengan kegiatan tanpa menggunakan api dalam membuka dan membersihkan lahan.

Kegiatan kami didasarkan pada strategi dan pendekatan *multistakeholder* secara partisipatif di berbagai tingkat. SSFFMP mendukung lembaga utama untuk kegiatan mikro di lapangan. Pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah, LSM dan sektor swasta. Jika diperlukan keahlian khusus, kami melakukan kerjasama dengan tenaga ahli atau penyedia jasa lainnya.

Sejak dimulai pada tahun 2003, bersama dengan para mitra, kami memilih desa prioritas yang rawan kebakaran, untuk menawarkan dukungan dalam mengurangi kebakaran. Semua *stakeholder* yang terkait berperan dan memberikan perhatian utama. Hal ini dibuat bukan melalui proses yang cepat, tetapi yang penting adalah Bagaimana meletakkan dasar dan komitmen yang kuat.

Pada akhir tahun 2006, hasil monitoring dan evaluasi di berbagai desa prioritas yang didukung SSFFMP menunjukkan hasil yang positif, bukan hanya diukur dari segi ekonomi tetapi dari segi kualitatif pembangunan, seperti: mereka menyukai kegiatan penguatan, menentukan nasib sendiri, kepercayaan dan rasa percaya diri, serta tingginya tingkat partisipasi. Hal ini sangat penting dari segi keterlibatan mereka dalam upaya utama kami membantu mempercepat pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

Pengembangan masyarakat bagi kita semua merupakan pengalaman belajar, dan tidak ada satu contoh pun dapat diambil darinya yang dapat diterapkan dengan mudah, tetapi teknik dan metodenya dapat diadaptasi dan diterapkan secara fleksibel.

Saat ini, kami telah membuat satu langkah penting kedepan, pengalaman dan kegiatan utama telah membuahkan hasil yang positif.

Untuk semua staf SSFFMP dan *counterpart* ini adalah penghargaan yang diberikan masyarakat, lembaga dan perusahaan swasta untuk membantu dan mendukung mereka dalam kegiatan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kami adalah mitra yang layak dan dapat percaya dimasa lalu dan masa yang akan datang setelah proyek ini diambil alih oleh mitra kami.

Kami pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk bekerjasama dan untuk meningkatkan capaian dan hasil yang lebih baik di masa depan.

Kami merasa yakin, anda akan mengapresiasi dan membaca dengan rinci artikel dalam edisi kali ini sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kami kerjakan dan kami capai bersama berbagai pihak. Tetaplah ingat dan bersedia membaca Edisi berikutnya.

Dr. Karl Heinz Steinmann

Daftar Isi

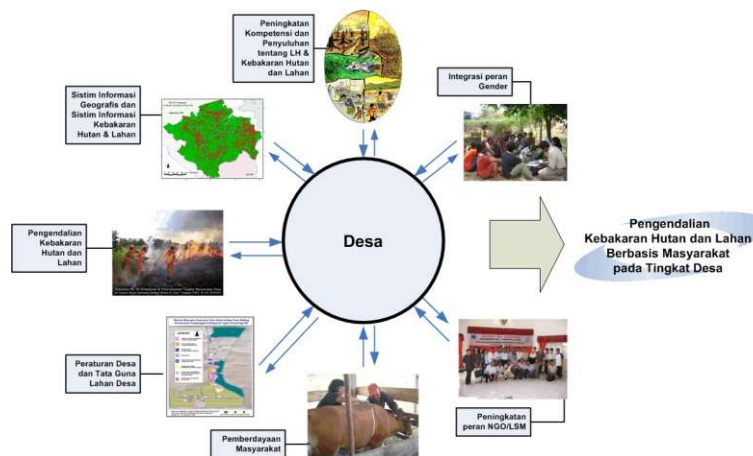
Surat dari Co Director	2
Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pendekatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	3
PPL Swakarsa dan Sukakeswan, Agen dan Pendamping Pengembang Masyarakat	4
Peningkatan Pendapatan Pada Kelompok Perempuan	5
Peran LSM dalam Pengembangan Masyarakat Sebagai Pendamping Kelompok	6
Meningkatkan Peran PPL dalam Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan	7
Pemanfaatan Limbah Pertanian : Alat Pengering Padi Berbahan Bakar Sekam	8
Penyebarluasan Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Radio Komunitas	9
Sebaran Regu Pemadam Tingkat Desa, Peluang Mobilisasi Untuk Menanggulangi Kebakaran di Pedesaan (Bagian I)	10
Urgensi Kebijakan Dalam Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan	12
Mengkaji Dampak Polusi Asap Kebakaran Hutan dan Lahan	13
Info Kegiatan	16

Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pendekatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Djoko Setijono*

Berdasar data jumlah dan persebaran titik api tahunan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, nyaris seluruh wilayah propinsi tertutup oleh ribuan titik api. Api berada dimana-mana sehingga mempersulit untuk upaya pemadamannya, karena terbatasnya sumber daya yang tersedia, rasanya tidak akan mungkin masyarakat hanya mengandalkan bantuan dari regu-regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dari Manggala Agni atau regu-regu pemadam kebakaran dari perusahaan-perusahaan yang ada. Oleh sebab itu, SSFFMP di Sumatera Selatan secara komprehensif mencoba merintis pengembangan sistim pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat pada tingkat desa.

Dalam rangka mengembangkan sistim pengendalian kebakaran



hutan dan lahan berbasis masyarakat pada tingkat desa, strategi yang diterapkan adalah secara simultan mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan 7 (tujuh) komponen kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sbb:

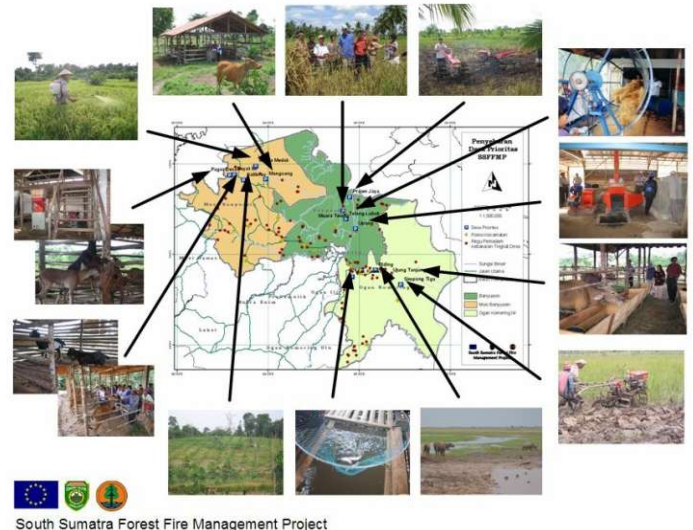
1. Peningkatan kompetensi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kebakaran hutan dan lahan
2. Peningkatan sistim informasi geografis dan sistim informasi kebakaran hutan dan lahan
3. Peningkatan keterampilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4. Penyusunan peraturan desa dan tata guna lahan desa
5. Peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat
6. Peningkatan peran NGO/LSM
7. Peningkatan Integrasi peran gender

Pada komponen *community development* atau pemberdayaan masyarakat, SSFFMP membuat contoh lapangan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat pada 13 (tigabelas) desa sasaran, yaitu Pagar Desa, Bayat Ilir, Muara Medak, Kali Berau dan Mangsang di Kec Bayung Lincir, Kab MUBA; desa-desa

Upang, Talang Lubuk, Muara Telang dan Prajen Jaya di Kab Banyuasin; dan Desa-desa Ulak Kemang, Riding, Ujung Tanjung dan Simpang Tiga di Kab OKI, sebagaimana bagan persebaran dibawah ini.

Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat dari beberapa contoh

CONTOH LAPANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SSFFMP



lapangan peningkatan pendapatan masyarakat yang difasilitasi oleh SSFFMP serta kaitannya dengan mengurangi kebakaran hutan dan lahan selama tiga tahun terakhir ini, antara lain adalah:

1. Di desa Muara Telang, Prajen Jaya, Muara Medak dan Simpang Tiga, dimana kegiatan peningkatan pendapatan dengan cara optimalisasi budidaya padi, telah secara signifikan meningkatkan pendapatan keluarga anggota kelompok tani, peningkatan kualitas beras akibat penanganan pasca panen yang lebih baik, dll.
2. Peningkatan luas areal pertanian/persawahan baru disertai makin intensifnya pengolahan lahan telah menekan lahan tidur dan semak belukar di desa sasaran, yang umumnya pada areal-areal tersebut terakumulasi biomassa yang tinggi, potensial sebagai bahan bakar yang rawan terbakar pada musim kemarau panjang.
3. Dari perubahan perilaku masyarakat, keberhasilan khusus ditunjukkan oleh Desa Simpang Tiga, Kec Tulung Selapan yang dalam musim tanam tahun 2006/2007 ini telah berhasil merubah lahan rawa lebak seluas 160 ha yang selama ini secara tradisional dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sonor dengan pembakaran, dirubah menjadi sawah permanen dengan teknik budidaya melalui pengolahan tanah, benih padi unggul, penggunaan saprodi serta dengan pengendalian hama penyakit tanaman yang baik. Panen padi perdana sawah rawa lebak di Desa Simpang Tiga direncanakan dihadiri oleh Bupati Kab OKI pada awal Maret

Bersambung ke hal 14

PPL Swakarsa dan Sukakeswan, Agen Pendamping Pengembangan Masyarakat.

Djoko Setjono*

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa sampai dengan awal 2007 SSFFMP telah dan sedang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa contoh lapangan peningkatan pendapatan masyarakat pada 13 (tiga belas) desa sasaran. Ketiga belas desa tersebut adalah desa-desa Pagar Desa, Bayat Ilir, Muara Medak, Kali Berau dan Mangsang di Kabupaten MUBA; desa-desa Prajen Jaya, Muara Telang, Talang Lubuk dan Upang di Kab Banyuasin; dan desa-desa Ujung Tanjung, Simpang Tiga, Riding dan Ulak Kemang di Kab OKI.

Kegiatan yang dikembangkan terutama dalam bidang pertanian dalam arti luas, yang meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Sampai dengan akhir 2006, hanya beberapa desa yang ada Penyuluh Pertanian Lapangannya (PPL) Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan tenaga kesehatan hewan pada tingkat desa nyaris tidak ada.

Kelompok tani yang telah dan atau baru terbentuk sehubungan dengan program pemberdayaan masyarakat SSFFMP, rata-rata adalah kelompok tani pemula yang relatif sangat jauh dari informasi serta memerlukan pembinaan, motivasi dan fasilitasi dari idealnya para PNS Penyuluh Pertanian, termasuk para petugas kesehatan hewan, namun apadaya hal tersebut kelihatannya sulit untuk terpenuhi sehubungan dengan keterbatasan petugas lapangan yang ada tersebut.

Berangkat dari keadaan tersebut, didalam rangka mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, SSFFMP bekerjasama dengan BPTP dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura propinsi Sumatera Selatan, merekrut para petani lokal yang potensial untuk menjadi PPL Swakarsa dan telah diselenggarakan pelatihan dasar bagi PPL Swakarsa sebanyak 26 orang pada tgl 4-5 Juli 2006. Pelatihan dasar bagi Sukarelawan Kesehatan Hewan (Sukakeswan)



dilaksanakan bekerjasama dengan Heifer International Indonesia dan Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Selatan sebanyak dua kali, yakni pada bulan Nov-Des 2005 mengikut sertakan peserta sebanyak 3 orang dan pada tgl 17-22 Juli 2006 dilatih sebanyak 11 orang Sukakeswan.

Mengutip makalah Dirmansyah (2006) dalam *"Peran penyuluh swakarsa bagi pembinaan pertanian dan pedesaan"*, Penyuluh Pertanian Swakarsa dalam pembangunan pertanian adalah mitra kerja pemerintah, khususnya Penyuluh Pertanian PNS. Hubungan kerja antara Penyuluh Pertanian Swakarsa dengan Penyuluh Pertanian PNS adalah hubungan fungsional. Dengan demikian, Penyuluh Pertanian Swakarsa merupakan bagian dari sistem penyuluhan pertanian setempat.

Secara umum, fungsi Penyuluh Pertanian Swakarsa adalah:

- Sebagai pelopor atau inovator yang memberikan/ menawarkan hal-hal baru yang lebih baik bagi kehidupan para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
- Sebagai motivator, yaitu mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berusaha para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
- Sebagai katalisator, yaitu menjembatani dan mempercepat kemajuan usaha para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
- Sebagai fasilitator, yaitu memberi kesempatan, membuka peluang pengembangan ide-ide para petani didalam pengembangan usahanya.

Dalam kerangka penyuluhan pertanian, seorang Penyuluh Pertanian Swakarsa berperan sebagaimana layaknya seorang Penyuluh Pertanian PNS yaitu:

1. Menyebarkan/menyampaikan informasi agribisnis kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain.
2. Menyampaikan rekomendasi/anjuran kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain.
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta membentuk sikap positif petani dan pelaku usaha pertanian lain terhadap teknologi baru agribisnis.
4. Membimbing penerapan teknologi kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain.
5. Mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian melalui peningkatan swadaya dan swakarsa petani dan pelaku usaha pertanian lain.



Peningkatan Pendapatan Pada Kelompok Perempuan Yandriani*

Melalui perluasan program pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender, South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) di tahun 2005 membentuk dan menguatkan empat kelompok perempuan pada desa binaan di tiga kabupaten prioritas (OKI, MUBA, Banyuasin).

Program tersebut ditujukan sebagai upaya alternatif meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat desa serta meningkatkan kompetensi dan potensi perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan di tingkat desa. Hal ini juga mengacu pada hasil Konferensi Wanita Sedunia yang ke empat di Beijing, 1995 yang menyatakan perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dan keadilan yang sama di dalam setiap kesempatan. Pemberdayaan kelompok perempuan ini diharapkan mampu mengalihkan dan mengurangi kebiasaan mengolah lahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali.

1. Pembangunan dan Penguatan Kelompok Perempuan di SSFFMP

SSFFMP menginisiasi pembentukan dan penguatan Kelompok Perempuan di desa-desa binaan di tiga kabupaten prioritas untuk menambah pendapatan alternatif keluarga melalui kegiatan produktif lainnya dengan tujuan agar mereka mengurangi aktifitas membakar hutan dan lahan.

Empat Kelompok Perempuan yang telah dibangun pada desa-desa binaan itu adalah,

Tabel 1. Pembangunan dan Penguatan Kelompok Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Gender di SSFFMP.

No	KELOMPOK PEREMPUAN	LOKASI	KEGIATAN	KEIKUTSERTAAN
1	Kelompok Wanita Pengrajin Purun "Tunas Harapan"	Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI	Kerajinan Anyaman Purun	20 Orang (Pr)
2	Kelompok Wanita Tani Mandiri	Bayat Ilir Dusun II, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MUBA	Integrated Farming System (pengembangan ternak sapi dan tanaman sayuran)	14 Orang (Pr)
3	Kelompok Wanita Desa Upang	Desa Upang, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin	Pembuatan Kerupuk Kempelang dan Multiusaha Lainnya	25 Orang (Pr)
4	Kelompok Wanita Pengrajin VCO dan Rumah Dagang Industri Pengolahan Kelapa Terpadu	Desa talang Lubuk, Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin	Pengembangan Pengolahan Kelapa rakyat Terpadu (VCO, sabut dan Tempurung kelapa)	Kelp VCO 12 Orang (Pr) Rumah Dagang 8 Orang (7 Lk, 1 Pr)

2. Manajemen Kelompok Perempuan yang Berwawasan Gender

Penguatan kelompok perempuan telah berjalan dengan baik sepanjang kurun tahun 2005 hingga 2006. Hal ini dapat dilihat di tabel 2

3. Signifikansi Kegiatan Kelompok Perempuan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel 2. Penguatan kelompok perempuan tahun 2005 - 2006

NO	KELOMPOK	BANTUAN HARDWARE DAN SOFTWARE	PELATIHAN	
			TEKNIS	NON TEKNIS
1	Kelompok Wanita Tani Mandiri	Saprodi (benih, pupuk, herbisida, APSA-800 WSC, Nutrifarm, ternak Sapi(2 ekor jantan, 14 ekor betina), bantuan untuk pembuatan balai pertemuan, mesin genset, prasarana untuk pengembangan demplot cabe, 3 (tiga) unit hand sprayer, dll. Pendampingan secara reguler. Study Banding.	Integrated farming system antara ternak dan tanaman (kerjasama dengan BPTP Prov Sumset), sukaeswan (kerjasama dengan HPI), pembuatan pupuk kompos (kerjasama dengan PPL)	Penyadaran peran Gender, pengelolaan ERT, pembukaan sederhana, manajemen organisasi dan dinamika kelompok
2	Kelompok Wanita Pengrajin Anyaman Purun "Tunas Harapan"	Purun kecil 1500 ikat, 4 unit mesin jahit standard, contoh kerajinan purun(tas, papan pesanan (white board), etalase. Pendampingan secara reguler. Study Banding.	Pelatihan teknis anyaman purun (kerjasama PemKab, PKK Kab OKI dan SSFFMP), magang / on the job training perajin purun ke perdana handicraft, solok-Sumatera barat.	Lokakarya penyadaran peran gender, lokakarya pengelolaan ERT, pelatihan manajemen organisasi dan dinamika kelompok
3	Kelompok Wanita Desa Upang	Tambahan modal untuk membeli bahan membuat kemplang dan usaha holtikultura, 2 unit sealer, pemotong kemplang manual, papan data (white board). Pendampingan secara reguler.		Lokakarya penyadaran peran gender, lokakarya pengelolaan ERT
4	Kelompok Wanita Pengrajin VCO dan Rumah Dagang Industri Pengolahan Kelapa Terpadu	Seperangkat peralatan untuk membuat VCO, 4 unit mesin parut kelapa, fasilitas pameran (komoditi VCO), papan data (white board). Pendampingan secara reguler. Study Banding.	Pelatihan pengolahan Kelapa terpadu yang berwawasan gender	Penyadaran peran gender, pengelolaan ERT, pelatihan manajemen organisasi dan dinamika kelompok

Adanya IGAs (*Income Generating Activities*) pada kelompok perempuan di atas diharapkan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan KARHUTLAH. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan melalui kegiatan kelompok perempuan pengrajin purun "Tunas Harapan" di Desa Ulak Kemang Kec. Pampangan. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok binaan SSFFMP di Kabupaten OKI yang mengolah purun agar dapat meningkatkan pendapatan alternatif rumah tangga.

Purun merupakan salah satu jenis tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah rawa Kabupaten OKI dan mudah terbakar pada waktu musim kemarau. Tanaman jenis ini kurang dimanfaatkan oleh warga sekitar karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Pada musim kemarau, daerah rawa yang banyak purun tersebut, seringkali terbakar karena temperatur suhu yang terlalu tinggi. SSFFMP melalui salah satu program Pemberdayaan Masyarakat yang sensitif gender mencoba membina kelompok perempuan di Desa Ulak Kemang yang selama ini mengolah purun menjadi tikar yang dijual dengan harga yang relatif sangat rendah dan merupakan pekerjaan sambilan. Untuk menghindari terjadinya kebakaran pada musim kemarau disebabkan purun kurang dimanfaatkan, maka oleh SSFFMP mencari solusi bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan purun oleh perajin. Maka bekerjasama dengan Pemda dan PKK Kab. OKI, SSFFMP membina kelompok perajin purun perempuan yang diberi nama "Kelompok Tunas

Bersambung ke hal 14



Peran LSM Dalam Pengembangan Masyarakat Sebagai Pendamping Kelompok Nurnajati*

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menuju kemandirian dan keberlanjutan yang berkeadilan gender di desa-desa prioritas di tiga Kabupaten Prioritas (MUBA, BANYUASIN, DAN OKI) guna mengurangi pembakar hutan oleh masyarakat dilahan pertaniannya, Maka SSFFMP bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, BPTP dan Dinas-Dinas terkait lainnya telah membentuk dan mendampingi beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat di 13 desa Kabupaten prioritas tersebut, dengan program peternakan, perikanan, dan integrasi *farming system*. Maka untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola organisasinya, di perlukan pendampingan yang intensif dari LSM/NGO melalui proses persahabatan untuk mendorong terjadinya perubahan yang berarti dalam mencapai tujuan pengembangan masyarakat yang hakiki, usaha mengenali identitas (sifat, minat serta kemampuan) dasar kelompok dengan melakukan usaha pemberdayaan melalui transformasi dan demokratisasi.

Tujuan Pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap masyarakat dalam mengelola organisasi atau kelompok menuju kemandirian dan keberlanjutan yang berkeadilan gender. Maka untuk mencapai tujuan diatas, bahwa program pendampingan oleh LSM, mempunyai dua pendekatan utama, yaitu :

Pendekatan Proses.

Pendekatan pendampingan yang memberikan peranan penting bagi pendamping dalam proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola organisasi/kelompok. Didalamnya terdapat lima Aspek pokok yang meliputi : aspek organisasi dan kelembagaan, aspek administrasi, aspek permodalan, aspek usaha produktif dan aspek jaringan kerja. Kelima aspek tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sangat perlu dipahami betul-betul oleh pendamping, agar mampu menjalankan peran pendampingan dengan sebaik-baiknya.

Pendekatan Hasil.

Dari hasil yang diharapkan dari dampak pendampingan juga meliputi lima bagian yang berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Kemampuan dalam mengelola organisasi atau kelompok.
2. Kemampuan dalam melaksanakan administrasi yang tertib dan Transparan.
3. Kemampuan dalam menggali permodalan dan pendayagunaan modal.
4. Kemampuan untuk melakukan usaha-usaha yang menguntungkan secara ekonomis.
5. Serta kemampuan dam membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar yang dapat mendukung program kelompok.

Kelima bagian diatas, harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, karena keberhasilan pada satu bagian tidak otomatis menjamin keberhasilan pada bagian lain, namun sebaliknya keberhasilan pada satu bagian akan memberikan dukungan untuk keberhasilan bagian yang lain.



Prinsip Dasar Pendampingan oleh LSM/NGO.

Prinsip Kesetaraan

Pendamping dengan kelompok yang didampinginya mempunyai kedudukan yang setara atau sederajat.

Prinsip Persahabatan

Pendamping mempunyai keterlibatan secara emosional dalam arti ikut merasakan kegembiraan maupun kesedihan kelompok, sehingga semua pihak dalam kelompok bersedia untuk berbagi rasa, karena adanya perasaan aman dan tenteram serta keinginan untuk saling tolong menolong secara jujur dan ikhlas.

Prinsip Kebersamaan

Kelompok dan pendamping selalu berusaha dalam kebersamaan, baik dalam suasana menyenangkan dan apalagi dalam situasi sakit, dan masalah kelompok dipecahkan bersama sama.

Prinsip Kemanusiaan

Kelompok dan pendamping secara bijaksana tetapi konsisten memperjuangkan berlangsungnya nilai nilai kemanusiaan yang bersifat umum dan universal terutama lingkungan kelompok, dan pendamping harus bersifat jujur, adil, sopan santun dan menghormati hak dan kewajiban sabagai pendamping.

Prinsip Realitas

Kelompok dan pendamping men - dasarnya tindakannya pada kenyataan yang ada, dengan memahami situasi dan kondisi dimana kelompok berada dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan kelompok.

PERAN PENDAMPING

Maka didalam proses pendampingan, seorang pendamping akan menjalankan peran peran sebagai berikut :

1. **Sebagai Fasilitator**, untuk membantu kelompok dalam memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan diri melalui kegiatan bersama antara pendamping dan kelompok dalam rangka menemukan alternatif pendekatan untuk mencapai tujuan tujuan kelompok.
2. **Sebagai Motivator**, pendamping dapat memberikan dorongan dan semangat dengan memperlihatkan adanya harapan keberhasilan, mengemukakan unsur- unsur positif dan kekuatan kelompok, serta menekankan kewajiban untuk terus berusaha secara giat, gigih dan tekun agar kelompok maju dan berkembang.

Meningkatkan Peran PPL Dalam Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan

Mochamad Saleh*

Dari data statistik titik api atau hotspot pada tahun 2006, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan terjadi di lahan pertanian campur dan lahan pertanian di lahan gambut, dari data tersebut mengindikasikan bahwa sumber titik api berasal dari kegiatan pertanian, terutama untuk pembersihan lahan dan penyiapan lahan untuk penanaman baru.

Kejadian pada tahun 2006, pembakaran tersebut menjadi sulit dikendalikan dan telah menimbulkan kabut asap menyelimuti kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya selama kurang lebih tiga bulan. Tentunya kabut asap telah menghambat kegiatan transportasi udara, darat, dan perairan dan merugikan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Melihat sumber kejadian, tentunya masyarakat petani dan masyarakat yang berada di sekitar berperan penting untuk melakukan pencegahan dan terlibat penanggulangan kebakaran lahan.

Sumatera Selatan, berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 1.277 orang Penyuluh Pertanian Lapangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 165 orang honorer yang tersebar di 101 Balai Penyuluh Pertanian atau 151 seluruh Kecamatan. Semenjak masuk era reformasi, PPL mengalami penurunan fungsinya dan nyaris tidak organisasi dengan baik. Sehingga banyak PPL yang beralih tugas seperti menjadi guru dan berpindah tempat kerja. Tetapi baru-baru ini Gubernur Sumatera Selatan telah berupaya merevitalisasi peran fungsi PPL, dengan merestrukturisasi dan memberikan bantuan sarana transportasi dan operasional PPL.

Balai Penyuluh Pertanian yang ada di hampir seluruh Kecamatan merupakan markas bagi para PPL, setiap dua minggu BPP memfasilitasi pertemuan antara PPL dengan kelompok tani di wilayahnya untuk mendiskusikan berbagai hal tentang pertanian. Hal merupakan media komunikasi efektif antara PPL dengan petani disamping kunjungan atau penyuluhan dilapangan yang dilakukan oleh PPL. Komunikasi antara kedua pihak ini memiliki peluang untuk mengkampanyekan pencegahan kebakaran dan mensosialisasikan berbagai pengetahuan dan teknologi pertanian yang kurang bakar.



Social Marketing dalam Penyuluhan

SSFFMP pada bulan Agustus 2006 yang lalu, telah memulai melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan "Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan *Social Marketing*", salah tujuan pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat bahan dan materi penyuluhan dengan pendekatan komunikasi lingkungan dan *social marketing*, sebanyak 21 orang penyuluh mengikuti pelatihan ini. Berbagai materi telah diberikan antara lain teknik survey dan pengolahan data; teori mengenai perubahan perilaku; pengembangan pesan, segmentasi dan pemilihan media; evaluasi pesan dan efektivitas media; serta perencanaan penjangkauan.

Pelatihan tersebut dirancang dibagi dua fase, yaitu: fase pertama pelatihan, fase kedua implementasi kegiatan, dan fase ketiga evaluasi dan sharing pengalaman. Setelah selesai fase pertama, atas bantuan dan dukungan SSFFMP para peserta mempraktekan penyuluhan selama dua bulan pada bulan September dan Oktober 2006 bertepatan dengan puncak musim kemarau. Mereka melakukan penyuluhan di daerah kerja dan kelompok petani binaannya.

Peningkatan Peran melalui Pelatihan untuk Pelatih

Mengingat potensi yang dimiliki penyuluh dalam menyampaikan pesan pencegahan kebakaran yang sangat luas, maka pada AWP V 2007, SSFFMP akan melakukan pelatihan untuk pelatih PPL dalam penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan pelatihan ini diharapkan tersedia tenaga yang dapat melatih dan membagikan pengalaman penyuluhan untuk pencegahan kebakaran.

Seluruh dinas dan instansi terkait seharusnya memberikan perhatian kepada PPL untuk meningkatkan peran mereka, karena mereka memiliki jangkauan hingga daerah terpencil serta peran komunikasi mereka dengan masyarakat, khususnya petani yang menjadi binaannya.

Dengan berakhirnya masa kerja SSFFMP di Sumatera Selatan pada akhir 2007, ada mitra lapangan (PPL) yang melakukan pendidikan dan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan tersebarnya pesan, pengetahuan, dan teknologi

Training Awareness Specialist SSFFMP*

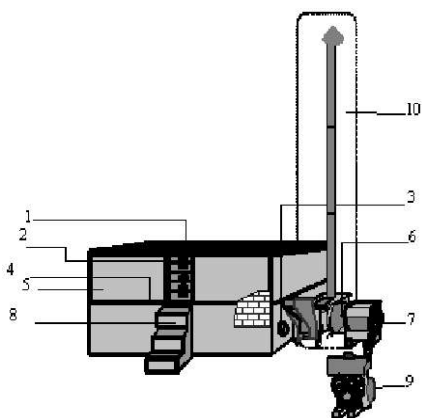


Pemanfaatan Limbah Pertanian : Alat Pengering Padi Berbahan Bakar Sekam

Budi Raharjo*

Penanganan Pasca panen menentukan dalam produktivitas petani, SSFFMP bekerjasama dengan BPPT mengembangkan pengering padi berbahan bakar sekam di Desa Upang. Dengan demikian petani lebih diberdayakan untuk memperkuat potensi yang ada pada mereka dengan memberikan bantuan yang memungkinkan mereka untuk berkembang.

Proses pengeringan melalui penjemuran di lahan pasang surut banyak menemui hambatan. Hambatan tersebut antara lain: waktu panen bertepatan dengan musim hujan, kondisi lingkungan yang lembab, tenaga kerja kurang, dan fasilitas yang minim di petani. Akibatnya proses panen dan penjemuran padi banyak tertunda dalam waktu yang cukup lama, sehingga beras yang dihasilkan bermutu rendah (Ananto, *et al.*, 1999). Oleh karena itu pengembangan mesin pengering haruslah disertai dengan pengembangan *power thresher*, untuk dapat menyediakan gabah kering panen (GKP) yang bermutu tinggi sebelum dikeringkan. Mengeringkan gabah di lahan rawa terutama lahan pasang surut Sumsel umumnya masih dilakukan dengan fasilitas yang minim seperti penggunaan tikar dan terpal plastik. Namun ada juga yang menggunakan lantai jemur.

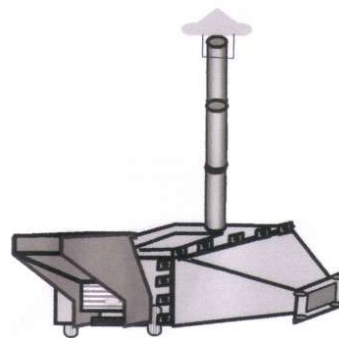


Gambar 1. Alat Pengering Tipe Box Modifikasi Bahan Bakar sekam

Keterangan:

1. Bak pengering
2. Pintu unloading
3. Termometer
4. Besi plat porous
5. Ruang gabah
6. Saluran udara dari bh terpal
7. Blower aksial
8. Tangga
9. Motor bakar penggerak blower
10. Cerobong Asap

Kesemuanya ini tergantung penuh dengan sinar matahari, hal ini



Gambar 2. Tungku Sekam Model ABC

akan menjadi masalah ketika musim hujan tiba. Penggunaan bahan bakar minyak untuk pengeringan gabah harganya terus meningkat, juga sebagai akibat biaya transportasi dan ketersediaannya sering mengalami kelangkaan. Di lain pihak, keberadaan sekam di unit-unit penggilingan padi cukup banyak, dan posisinya lebih dipandang sebagai limbah. Oleh karena itu hadirnya tungku model "ABC" menggunakan sekam sebagai bahan bakarnya di dalam sistem pengeringan menggantikan fungsi burner BBM, membuka peluang menurunkan biaya pengeringan. Biaya pengeringan gabah tidak saja menjadi lebih rendah tetapi cukup bersaing dengan penjemuran. Hal ini akan membuka peluang dimana mesin pengering tidak hanya digunakan pada panen musim hujan tetapi juga di musim kemarau. Dengan demikian masa operasi mesin pengering per tahun akan bertambah panjang.

Hasil ujicoba pada kegiatan CD SSFFMP di Desa Upang menunjukkan, bahwa rendemen giling rata-rata dari tiga varietas (Cihayang, IR42 Manggar dan Tiga Dara) sebesar 64,00%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penjemuran (60,00%) dan *Dryer BBM* (62,00%) pada penelitian sebelumnya. Persentase beras kepala rata-rata dari tiga varietas sebesar 69,96% juga lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penjemuran (34,83%) dan *Dryer BBM* (64,75%) (Raharjo *et al.*, 2005b). Biaya pengeringan *dryer BBS*, penjemuran, dan *dryer BBM* berturut-turut Rp.22,55/kg GKP; Rp.30,00/kg GKP; dan Rp.60,00/kg GKP (Sutrisno, 2004). Selain ramah lingkungan karena menggunakan sekam yang selama ini masih dianggap sebagai limbah, abu sekam hasil pembakaran dari tungku dapat digunakan untuk memperbaiki keasaman tanah lahan pasang surut (bahan amelioran).

Cara Mengoperasikan Mesin Pengering

- Gabah basah maksimum sebanyak 3,5 t dimasukkan ke dalam ruang pengering secara curah, kemudian permukaannya diratakan.
- Hidupkan blower untuk mengeluarkan panas di dalam tumpukan gabah, dan pastikan bahwa aliran udara pengering menembus tumpukan gabah. Caranya letakkan secarik kertas di permukaan gabah, dan kertas tersebut dapat bergerak-gerak atau menggunakan alat flow meter.
- Nyalakan tungku dan tentukan suhu pengeringan lewat termometer jarum pada dinding plenum.
- Pada saat proses pengeringan sedang berlangsung, operator tidak diperbolehkan meninggalkan tempat.
- Lakukan kontrol terhadap bahan bakar (sekam) agar tidak terjadi kehabisan bahan bakar selama berlangsungnya proses pengeringan.

Bersambung ke hal 15

Penyebarluasan Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Radio Komunitas

Solichin, Msc.*

Dipicu oleh semangat reformasi pada tahun 1998 dan dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai satu-satunya pemegang kendali siaran nasional, rakom atau radio komunitas mulai semakin pesat berkembang di Indonesia. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) bahkan telah didirikan dengan anggota dari berbagai jaringan radio komunitas di seluruh nusantara. Di Sumatera, jaringan radio komunitas baru terdapat di provinsi Sumatera Barat dan Lampung. Walaupun belum memiliki JRK, provinsi Sumatera Selatan sebenarnya telah memiliki rakom, salah satunya di Desa Simpang Bayat. Namun karena beberapa kendala teknis, rakom tersebut kurang berjalan dengan baik.

Rakom merupakan media untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat independen, tidak komersil, non partisan serta melayani kepentingan komunitasnya untuk tujuan pendidikan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Rakom harus diinisiatifkan, didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh sebuah komunitas masyarakat itu sendiri, atau jargonnya “dari, oleh, tentang dan untuk masyarakat”.

Kemauan dan Komitmen Komunitas

Belajar dari pengalaman pengembangan rakom sebelumnya baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, kemauan serta komitmen dari masyarakat itu sendiri sangatlah penting. Tidak sedikit rakom yang pada fase awalnya mendapat dukungan dari luar, baik lembaga non pemerintah maupun lembaga keagamaan, yang berakhir tragis setelah ditinggalkan oleh pemberi donor. Karenanya penilaian awal mengenai keseriusan unsur-unsur masyarakat untuk mengembangkan rakom sangatlah diperlukan. Keseriusan tersebut harus mencakup adanya kebutuhan masyarakat akan penyebaran informasi yang aktual dan akurat seputar pembangunan desa, adanya anggaran baik untuk operasional maupun perawatan, serta tersedianya sumberdaya manusia yang terdiri dari teknisi, pengumpul berita, sutradara ataupun seniman.

Dengan adanya kemauan dan komitmen yang tinggi, kreatifitas di dalam menjalankan program-program rakom akan menjadi lebih dinamis, sehingga akan lebih menarik minat masyarakat pendengar yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber pendapatan untuk biaya operasional. Pada umumnya rakom menggalang biaya operasional melalui permintaan lagu dan pengumuman hajatan. Walaupun seringkali untuk pengumuman yang bersifat musibah atau untuk kepentingan bersama tidak dipungut biaya. Iklan dari sponsor lokal seperti restoran, toko atau usaha komersil lainnya, diterapkan dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga dapat menutupi biaya operasional (perawatan alat, transportasi liputan, listrik, dll) yang berkisar antara 100 200 ribu rupiah per bulannya.

Pendekatan Lokal dan Partisipatif

Berasaskan pendekatan partisipatif, setiap program rakom harus dirundingkan sebelumnya untuk mendapatkan masukan-



masukannya dari berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut dapat mewakili kelompok dari tokoh agama, kelompok dengan berbagai tipe mata pencarian, penyuluh lapangan, regu pemadam kebakaran, perwakilan dari berbagai dusun, kelompok perempuan, maupun remaja. Dengan adanya pertemuan rutin, perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut dapat menyalurkan aspirasinya sehingga program yang disiarkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan komunitas masyarakatnya. Selain itu bentuk hiburan dan kesenian yang disajikan harus sesuai dengan tradisi masyarakat. Program-program siaran dengan format lokal inilah yang menjadi kekuatan utama untuk bersaing dengan radio komersil swasta lainnya.

Selain itu program penyuluhan atau pembangunan desa dari instansi pemerintah akan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan fasilitas media rakom. Interaksi antara masyarakat dimungkinkan dengan adanya program diskusi, pengumuman, atau bahkan pemberian atensi atau permintaan lagu.

Penyebaran Informasi dan Penyardartahuan Dampak Kebakaran

Sebagai sebuah media, rakom memiliki potensi yang tinggi di dalam mendukung upaya penyebaran informasi kebakaran serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran. Karenanya, pemilihan lokasi rakom perlu didasari atas beberapa pertimbangan antara lain:

- adanya kemauan dan komitmen dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan rakom untuk keperluan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan,
- mampu memfasilitasi kepentingan kelompok masyarakat khususnya yang terkait dengan sonar dan kebakaran hutan dan lahan,
- lokasi yang berdekatan dengan daerah yang rawan kebakaran,
- Memiliki komponen penanggulangan kebakaran yang aktif melakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di desanya.

Kriteria di atas sangatlah penting mengingat, pesan-pesan yang disampaikan harus dapat mengenai sasaran dan searah dengan upaya penyadaran akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya pemenuhan kriteria tersebut, pengurus rakom

Bersambung ke hal 15

Sebaran Regu dan Peralatan Kebakaran Tingkat Desa, Serta Posko Sebagai Kunci Mobilisasi Regu Dalam Penanggulangan Kebakaran di Pedesaan

DR. H. M. Nicolas,*
Hairul Pansah, S.Hut,**
Rifa'i Komara.***

A. Latar Belakang.

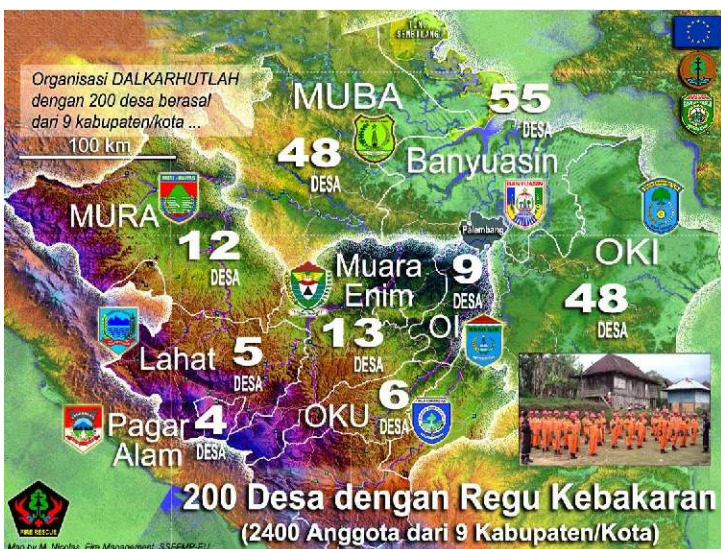
SSFFMP melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil nyata yang telah dibangun oleh komponen pengendalian kebakaran hutan dan lahan dipandang perlu untuk disosialisasikan agar pihak instansi terkait mulai merencanakan dan menjamin untuk melanjutkannya.

Sebaran Regu dan Peralatan Kebakaran.

Dalam upaya membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Sejak tahun 2003, proyek SSFFMP melalui komponen pengendalian kebakaran telah membentuk 50 kader pelatih yang berasal dari 9 kantor Dishut Kabupaten/kota, Dishut Provinsi, Disbun Provinsi, Perusahaan HTI, Perusahaan Perkebunan dan LSM.

SSFFMP juga telah melakukan pelatihan kebakaran untuk masyarakat desa sebanyak 200 desa dengan total anggota 2.400 orang yang tersebar pada sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan (lihat keterangan gambar). Seluruh regu desa yang telah terlatih diberikan pelatihan penyegaran yang diadakan setiap tahun sebelum musim kemarau. Seluruh regu desa juga diberikan bantuan set peralatan kebakaran dan P3K yang menjadi inventaris desa (lihat keterangan gambar 2),

Gambar 1. Peta sebaran regu desa tiap kabupaten



Gambar 2. Peta sebaran regu dan peralatan regu desa tiap Kabupaten

ditambah 200 kotak P3K serta bantuan sarana transportasi air untuk patroli kebakaran sebanyak 6 unit perahu ketek untuk 6 desa prioritas dan 1 unit speedboat untuk Manggala Agni Daops OKI.

Posko Pengendalian Kebakaran

Untuk jenjang lebih tinggi dari regu desa, proyek SSFFMP telah melatih camat beserta staf dan membangun posko kebakaran di kantor kecamatan sebanyak 18 kecamatan yang tersebar di tiga kabupaten prioritas 15 kecamatan daftar telah dimuat pada Volume VII, November 2006, ditambah Kecamatan Sungai Keruh, OKI; Kecamatan Lalan, MUBA; Kecamatan Talang Kelapa di Banyuasin .

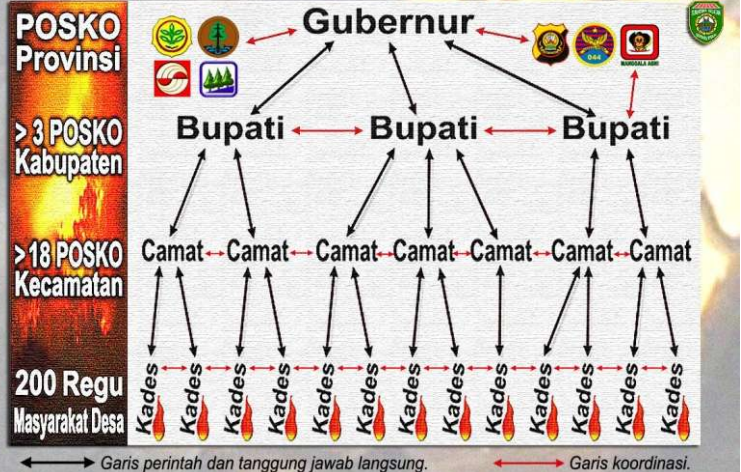
Selanjutnya setiap kecamatan yang telah terlatih diberikan set peralatan untuk posko dan menjadi inventaris kecamatan. Jumlah



Gambar 3. Peta sebaran Posko tiap Kecamatan di tiga Kabupaten

Peralatan posko yang telah diserahkan di kantor kecamatan (lihat keterangan gambar 3).

Kami mendukung instansi-instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi organisasi tetap R.I.



Gambar 4. Struktur komando pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Pada tahun 2007, proyek SSFFMP juga membangun Posko di kantor Dishut Provinsi dan di kantor Dishut di tiga Kabupaten prioritas yaitu Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

Masing-masing posko mendapatkan set peralatan sama dengan posko kecamatan, kecuali pompa. Posko Kabupaten dan provinsi telah mendapatkan 1 unit pompa *slip-on tank*. Termasuk Dishut Ogan Ilir dan Daops Manggala Agni OKI walaupun tidak termasuk posko.

Sistem Komando Operasi Kebakaran

Komponen pengendalian kebakaran telah membentuk/membantu ditingkat desa - tingkat kecamatan - tingkat kabupaten - hingga provinsi, dengan regu desa sebagai tulang punggung pemadaman kebakaran dilapangan, kecamatan sebagai komando untuk regu yang ada didesa, kabupaten sebagai komando untuk kecamatan, provinsi memegang komando untuk kabupaten.

Sehubungan dengan diatas, maka sistem komando dalam pengendalian kebakaran juga menggunakan struktur yang sudah ada dari provinsi hingga tingkat lapangan. Dengan demikian sebaran regu desa yang sudah terbentuk dapat dimobilisasi dengan baik ketika terjadi kebakaran.

Pengalaman Musim Kemarau tahun 2006

Suatu awal yang membanggakan ketika terbentuknya Manggala Agni di Sumatera Selatan dengan jumlah anggota 240 orang yang terbagi pada 4 Daops (Daops OKI, Daops Muba, Daops Banyuasin, dan Daops Lahat). Dilanjutkan dengan kegiatan Apel Siaga Nasional di Palembang dan merupakan peristiwa yang istimewa dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia beserta beberapa menteri kabinet Indonesia Bersatu.

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan bencana tahunan yang akan selalu terjadi sekalipun menggunakan alat dan teknologi yang canggih. Sadar atau tidak sadar yang perlu dilakukan mulai sekarang ini adalah bagaimana cara mengantisipasi agar kebakaran yang terjadi pada saat musim kemarau tidak terlalu parah.

Fenomena kebakaran yang terjadi di Sumatera Selatan tidak

terlepas dari 3 faktor yang mengakibatkan bahaya kebakaran, yakni; Kemarau, Gambut dan Sonor. Ketiga faktor tersebut selalu berinteraksi pada waktu yang bersamaan. Pada tahun 2006 di Sumatera Selatan banyaknya jumlah titik api



dan asap, menuntut pemerintah bergerak cepat untuk mengatasinya. Secara teknis, untuk mempermudah operasional pengendalian kebakaran diperlukan mekanisme operasi khusus tanggap darurat dan prosedur operasi tanggap darurat penanggulangan kebakaran dan lahan.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan melibatkan berbagai pihak pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten, perusahaan HTI, perusahaan perkebunan serta regu masyarakat desa terlatih yang dibantu oleh proyek SSFFMP.

Secara struktur, mobilisasi regu desa yang terlatih masih belum sepenuhnya dimanfaatkan termasuk peralatannya. Namun ditingkat lapangan, regu masyarakat sangat berperan aktif pada saat bencana kebakaran terutama kebakaran yang berada disekitar desa mereka dan melindungi aset yang dimiliki. Masih kurangnya dimanfaatkan regu dan peralatan yang ada didesa dikarenakan ketidakjelasan komando secara struktural dari atas hingga ke tingkat lapangan. (BERSAMBUNG)

- * Fire Management Expert SSFFMP
- ** Fire Training Specialist
- *** Fire Management Asisstant



Urgensi Kebijakan Dalam Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Syafrul Yunardy, S.Hut.,M.E.*

Ketika diadakan Konferensi Kebakaran Hutan dan Asap (*World Land and Forest Fire Hazard*) di Malaysia empat tahun yang lalu, para peserta sepakat memilih Indonesia sebagai Pusat Informasi dan Monitoring Kebakaran Hutan dan Asap untuk tingkat Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Alasan pemilihan Indonesia itu, karena di tingkat negara-negara Asia Tenggara, Indonesia merupakan yang paling banyak mengalami kebakaran hutan.

Namun sayangnya, Indonesia nampaknya belum mampu berbuat banyak dalam upaya mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan beserta dampak asapnya. Bencana lingkungan (kebakaran lahan dan hutan) yang menjadi penyebab kabut asap kembali berulang di tahun ini. Dan ini membuktikan betapa tingkat apresiasi, perhatian, pemantauan, prediksi dan antisipasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran lahan dan hutan masih jauh dari memadai. Secara lebih detil, hal ini juga menunjukkan bahwa sistem informasi dini yang ada selama ini belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Kepentingan SIK

Sistem Informasi Kebakaran (SIK) merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi komputer. Sistem ini dirancang untuk memadukan semua data dan informasi yang meliputi peringatan dini, deteksi, monitoring dan dampak kebakaran, untuk mendukung manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Aspek SIK biasanya menyangkut penilaian ancaman kebakaran (risiko, bahaya, antisipasi kerusakan kebakaran) deteksi dan pemantauan kebakaran penyediaan serta distribusi informasi kebakaran.

Kepentingan utama dari keberadaan SIK ini bahwa informasi tentang ancaman kebakaran akan menjadi input dasar, baik untuk efektifnya perencanaan, pencegahan maupun pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Karena data masukan yang digunakan meliputi peta penggunaan lahan terbaru, batas seluruh konsesi HPH, perkebunan, transmigrasi/pemukiman, data jaringan infrastruktur, aktifitas manusia, dan data tingkat kekeringan.

Karena SIK ini dikembangkan dan dibangun dengan sumber informasi utamanya adalah data cuaca, data tata guna lahan dan vegetasi maka informasi dan data yang terintegrasi tersebut tentu juga sangat berguna bagi perencanaan bagi suatu sektor maupun suatu daerah. Melalui database yang terintegrasi dalam suatu sistem ini dan mencakup hampir seluruh bidang kehidupan, dapat dilakukan analisis lanjutan yang akan berguna sebagai bahan penentuan dan pengambilan kebijakan pada sektor-



sektor yang terkait lainnya. Sebagai contoh, informasi tentang adanya pengeseran awal jatuhnya hujan (musim penghujan) sangat bermanfaat bagi perencanaan awal tanam bagi para petani. Demikian pula akan berguna bagi proses penyelesaian pekerjaan (tahapan) konstruksi.

Namun disadari bersama bahwa penyebaran dan penyusunan informasi merupakan aspek yang cukup sulit dan memiliki banyak kendala hingga saat ini. Selain karena kondisi geografis dan kurangnya peralatan komunikasi juga disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi serta keterbukaan dalam pemberian data dan informasi. Ditambah lagi tingkat akurasi data maupun peramalannya masih jauh dari harapan. Dan ke depan, hal ini menjadi catatan pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.

Kebijakan ke Depan

Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat efektifnya upaya pencegahan kebakaran, khususnya dalam membangun dan mengembangkan SIK. Kebijakan itu diantaranya adalah dengan meningkatkan kapasitas manajemen informasi prakiraan cuaca beserta fasilitas aksesnya yang efektif dan berkelanjutan, sebagai bagian yang mutlak dari Sistem Peringatan Dini. Penyiapan sistem peringatan dini yang efisien dan efektif yang disertai pengembangan sistem peramalan, akan mampu memberikan peringatan yang lebih tepat dan kian akurat terhadap adanya ancaman akan kebakaran lahan dan hutan serta bencana kabut asap.

Perlu pula dirintis adanya jalinan komunikasi elektronik yang terpercaya antara Pusat Manajemen Kebakaran (misalnya yang ada di Provinsi) dengan Pusat Manajemen Kebakaran yang ada pada level di bawahnya (misalnya yang ada di Kabupaten). Selain itu, Pusat Manajemen Kebakaran (PMK) yang ada di daerah (seperti di tingkat Provinsi) perlu memiliki satu bentuk 'Indeks Bahaya Kebakaran Propinsi' yang disepakati bersama dan secara berkala menginformasikan kepada publik tentang status kondisi/keadaan potensi maupun bahaya kebakaran yang mungkin terjadi.

Terakhir, tentunya perlu ditingkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan peralatannya yang dapat melakukan pemantauan yang bersifat operasional di lapangan.

*Staf BAPPEDA Sumatera Selatan

Mengkaji Dampak Polusi Asap Kebakaran Hutan dan Lahan

Nur Aifatul Ulya, S.Hut.,M.E.*

Polusi udara kini telah menjadi suatu masalah internasional. Sumber polutan dari suatu negara dapat saja mencemari negara di sekitarnya. Seperti halnya kasus kebakaran hutan pada tahun 1997 di 8 provinsi di negara kita telah menimbulkan dampak luas bagi kawasan Asia Tenggara. *World Wildlife Fund* (WWF) mengestimasi bahwa seluruh kerugian akibat kebakaran hutan tersebut tidak kurang dari 4,4 milyar dolar AS. Dan *World Health Organization* (WHO) memperkirakan sekitar 20 juta orang Indonesia menderita gangguan paru dan pernapasan.

Dampak buruk polusi udara pada kesehatan mulai menarik perhatian setelah timbulnya beberapa kejadian di Belgia tahun 1930, di Pennsylvania pada tahun 1948 dan di London tahun 1952. Pada peristiwa itu terjadi stagnasi udara yang mengakibatkan peningkatan jumlah bahan polutan di udara sehingga angka kematianpun meningkat tajam. Sebagian besar korban saat itu adalah mereka yang sangat muda, sangat tua atau sebelumnya telah menderita penyakit paru dan jantung. Kematian umumnya disebabkan oleh pneumonia, bronkitis dan penyakit paru.

Tahun 1997, dikenal sebagai tahun El-Nino yang membawa dampak musim kemarau di Indonesia menjadi panjang dan kering. Prosentase hujan yang jatuh pada saat itu hanya 55 % dari normalnya. Kekeringan yang cukup intensif tersebut telah menyebabkan meluasnya kebakaran hutan di beberapa wilayah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Kondisi iklim yang kering ditambah dengan kebakaran lahan dan hutan yang hebat menyebabkan meningkatnya kadar polutan baik gas maupun debu di atmosfer. Sebagai dampaknya, kualitas air hujan menurun yang diakibatkan oleh banyaknya polutan gas maupun debu yang terlarut dalam air hujan tersebut. Penurunan kualitas air hujan tersebut tercermin dari menurunnya nilai rata-rata pH jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pada tahun 1996. Jika di tahun 1996 nilai rata-rata pH di Indonesia 5.46, maka pada tahun 1997 nilai rata-rata pH 4.97. Hal ini merupakan suatu penurunan yang cukup signifikan.

Estimasi Kerugian

Kebakaran lahan dan hutan menjadi perhatian internasional

sebagai isu lingkungan dan ekonomi khususnya setelah terjadi kebakaran besar di berbagai belahan dunia tahun 1997/98 yang menghanguskan lahan seluas 25 juta hektar yang menelan biaya ekonomi akibat pencemaran kabut sekitar US \$ 674 -799 juta. Kerugian yang diderita tersebut kemungkinan jauh lebih besar lagi karena perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia tidak tersedia. Valuasi biaya yang terkait dengan emisi karbon kemungkinan mencapai US \$ 2,8 milyar (Tacconi, 2003). Bencana nasional kebakaran lahan dan hutan pada 1997 diperkirakan membuat Indonesia melepas 2,5 miliar ton karbon ke atmosfer. Menurut ahli lingkungan Susan Page dari Universitas Leicester Inggris, pelepasan sebesar ini setara dengan pelepasan karbon tahunan negara-negara Uni Eropa. Tingginya emisi karbon akibat kebakaran ini membuat beberapa ilmuwan mengaku terkejut karena tidak mengira hasilnya sebesar itu.

Asap dari kebakaran berdampak signifikan mengganggu kesehatan masyarakat terutama gangguan saluran pernapasan. Selain itu asap tebal juga akan mengganggu kelancaran sektor transportasi khususnya transportasi udara, darat, sungai, danau, dan laut, sektor pariwisata dan sektor perkebunan. Asap dari kebakaran lahan dan hutan telah mengganggu kesehatan, terutama masyarakat miskin. lanjut usia, ibu hamil dan anak balita. Sebagai contoh, selama selama 2 hingga 3 bulan terjadinya bencana asap di tahun 1997, gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit meningkat 2 hingga 3 kali di Riau dan Kalimantan Timur.

Sementara itu biaya kesehatan di 8 provinsi yang paling parah terkena bencana asap mencapai 394 milyar rupiah, termasuk untuk 527 kasus kematian dan hampir 2.5 juta hari kerja yang hilang. Ini merupakan estimasi yang masih sangat rendah karena hanya berdasarkan peningkatan kada debu. Apabila peningkatan polutan lain dan efek sinergis yang ditimbulkan bila dua polutan atau lebih masuk ke dalam tubuh secara bersamaan diperhitungkan, maka biaya kesehatan total mencapai 1.2 trilyun rupiah (KLH & UNDP, 1998).

Pada sektor transportasi, di tahun dan kasus yang sama, bandara udara di delapan propinsi tutup sebanyak 313 kali sehingga menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Jika setiap keterlambatan atau pembatalan menelan biaya 30 - 100 juta rupiah, maka total kerugian adalah 9.39 - 31.3 milyar rupiah. Sedangkan penerbangan komersial sendiri merugi 91 milyar rupiah. Sehingga total kerugian pada sektor transportasi udara saja diprediksikan 100.78 - 122.69 milyar rupiah. Di sektor pariwisata, dampak asap pada tahun yang sama telah menyebabkan pembatalan kunjungan ke Indonesia. Penurunan sektor pariwisata diperkirakan oleh WWF sekitar 8 - 25%. Jika kerugian penghasilan per hari diperkirakan 150 juta rupiah di Pulau Sumatera, maka kerugian yang diderita 22.5 milyar rupiah. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan, kerugian yang dialami antara 6.8 hingga 21.25 milyar rupiah. Berarti total kerugian di kedua Pulau tersebut mencapai kisaran 29.3 hingga 43.75 milyar rupiah. Untuk kasus perkebunan, produktivitas kelapa sawit di Jambi berkurang hingga 55% selama 3 tahun setelah kebakaran. Kebakaran skala sedang bisa mengurangi produktifitas sebanyak 80% pada tahun pertama dan 40% pada tahun kedua. Bahkan

Bersambung ke hal 14



Harapan” melalui kegiatan diversifikasi produk yang mengolah tika menjadi produk Tas, Sandal, Accesories, Folder, Map, dsdnya dan juga produksi mengacu kepada permintaan pasar. Dengan adanya nilai tambah yang cukup tinggi diterima oleh kelompok perajin perempuan, maka purun dapat dimanfaatkan secara optimal dan sekaligus akan berdampak dapat mengurangi tingkat kebakaran lahan rawa di musim kemarau.. Disisi lain ada anggota kelompok yang sudah menjadikan kegiatan kerajinan purun ini menjadi kegiatan pokok atau tidak merupakan kegiatan sambilan lagi.

4. Kesimpulan

- Adanya kelompok perempuan, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat desa secara signifikan.
- Pembinaan kepada kelompok perempuan dapat mengalihkan dan mengurangi kebiasaan mengelola lahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali.
- Kelompok perempuan di wilayah binaan SSFFMP diharapkan akan menjadi contoh bagi pemberdayaan dan pengembangan kelompok perempuan lain di desa sekitarnya.

*Gender Awarness SSFFMP

3. **Sebagai Nara Sumber**, didalam kehidupan kelompok ketika kelompok membutuhkan informasi tertentu, maka pendamping harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Dan apabila pendamping tidak dapat langsung menjawab pertanyaan yang diajukan, maka harus dicari jawabannya dengan menanyakan kepada pihak pihak yang berkompeten.
4. **Didalam kehidupan kelompok**, maka peran pendamping sebagai Penengah, karena didalam kelompok sering terjadi dinamika yang menimbulkan adanya perselisihan diantara anggota kelompok pada situasi yang kompak dan sakit, pendamping dapat membantu mengatasi keadaan tersebut.
5. **Sebagai Advokat Atau Pembela Hak Kelompok**, dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang diluar kelompok, maka pendamping harus berperan dala ikut membela kepentingan dan hak kelompok mulai dari hamabatan prosedur birokrasi, masalah legalitas, maupun kemungkinan adanya tuntutan hukum dari pihak lain.

TANTANGAN SEBAGAI PENDAMPING

Pendampingan di kelompok/masyarakat tidak semudah yang dibayangkan perlu kerja keras dan kerjasama yang sinergis antara pendamping dan kelompok , guna menindak lanjuti kendala kendala yang dihadapi dalam pendampingan dimasyarakat, yang antara lain:

- Sifat curiga mencurigai satu sama lain, yang menimbulkan kecemburuan sosial diantara mereka.
- Sifat individualistis masih tinggi.
- Sifat kona'ah atau masyarakat mudah cukup dengan situasi kehidupannya.
- Masyarakat sangat sulit menerima perubahan baru.

- Pendidikan dan keterampilan masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran program sangat terbatas, apalagi perempuan.
- Sikap hidup boros dan mental priyayi yang masih tinggi terjadi dimasyarakat.

Dengan melihat adanya kendala kendala diatas, merupakan tantangan yang berat bagi pendamping. *Mampukah kita mengatasi masalah masalah yang ada dan melakukan transformasi sosial dan budaya secara demokratis dan berkeadilan gender ?*. Pertanyaan ini baru dapat dijawab setelah melakukan proses realitas pendampingan yang cukup lama di lapangan. Dengan melihat dampak yang terjadi dari proses ini, bukan saja di segi ekonomi yang meningkat, tapi lebih dari itu diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

*LSM KEMASDA/Konsorsium NGO

4. Keberhasilan usaha peternakan pada desa-desa Mangsang, Bayat Ilir, Ujung Tanjung dan Riding, disamping memberi tambahan pendapatan bagi kelompok tani penggaduahnya berupa kepemilikan hewan ternak peliharaannya, juga merangsang berkembangnya pembuatan pupuk kompos dan bokashi dengan memanfaatkan kotoran ternak dan bahan-bahan limbah/sisa-sisa pertanian daripada dibakar.
5. Keberhasilan pengembangan ternak kerbau rawa di desa Riding, cenderung masyarakat mengkonservasi lahan rawa lebak sebagai padang penggembalaan kerbau dan cenderung tidak dijadikan lahan sonor/dibakar lagi.
6. Keberhasilan kerajinan anyaman purun didesa Ulak Kemang dan desa-desa disekitarnya, masyarakat cenderung mengkonservasi lahan-lahan rawa gambut sebagai habitat bahan baku industri rumah tangga anyaman purun, tidak membakarnya agar tanaman purun dapat tumbuh subur dan memberi kualitas bahan baku yang baik.

*Community Development Specialist SSFFMP

bila kerusakan sangat parah bisa mengurangi produktivitas hingga 100% di tahun pertama.

Langkah ke Depan

Melihat kenyataan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan oleh polusi asap akibat kebakaran lahan dan hutan maka perhatian semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah mesti lebih serius menangani permasalahan ini. Asap bukan lagi sekedar persoalan bencana belaka, namun telah menjadi problema lingkungan hidup yang berdimensi ekonomi, politik dan sosial. Disisi lain, oleh karena besarnya emisi karbon yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan serta tingginya pengaruh kebakaran hutan terhadap pemanasan global, maka sudah saatnya variabel kebakaran lahan dan hutan dimasukkan dalam membuat model pemanasan global.

*BALITAMAN

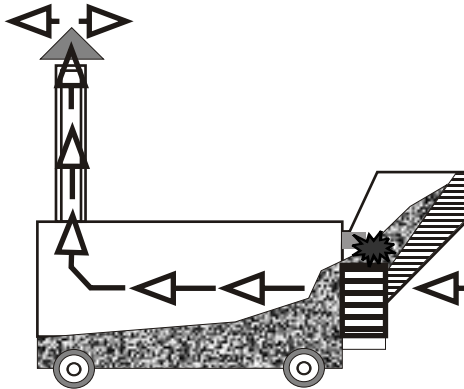
Pemanfaatan Limbah.....Sambungan dari hal 8

- Lakukan kontrol terhadap kadar air gabah lapis bawah, tengah, dan atas untuk mengetahui jalannya proses pengeringan yang sedang berlangsung.
- Proses pengeringan dapat dihentikan apabila kadar air rata-rata antara gabah lapis bawah dan atas 14%.

Biaya pengeringan *dryer BBS*, penjemuran, dan *dryer BBM* berturut-turut Rp.22,55/kg GKP; Rp.30,00/kg GKP; dan Rp.60,00/kg GKP (Sutrisno, 2004). Selain ramah lingkungan karena menggunakan sekam yang selama ini masih dianggap sebagai limbah, abu sekam hasil pembakaran dari tungku dapat digunakan untuk memperbaiki keasaman tanah lahan pasang surut (bahan amelioran).

Cara Menghentikan Proses Pegeringan

- Matikan tungku dan blower biarkan terus berjalan.
- Setelah 1 jam blower dihentikan.
- Gabah kering dapat dibiarkan di dalam ruang pengering atau dikemas di dalam karung.
- Setelah paling cepat selama 12 jam gabah kering baru boleh digiling.



Gambar 3. Cara menyalakan tungku sekam.

Cara Menyalakan Tungku Sekam

- Masukkan sekam ke dalam ruang pembakaran setebal 10 cm, sampai pada posisi diatas nako.
- Ambil sekam yang sudah dicampur dengan minyak tanah sebanyak sekepalan tangan dan letakkan pada posisi di atas nako dan nyalakan dengan korek api.
- Api dari titik pembakaran awal ini segera terisap oleh asap yang mengalir cepat melewati cerobong, dan membakar sekam pada alas pembakaran. Selanjutnya penuhi hopper dengan sekam.

Keunggulan Teknis

1. Kapasitas pengeringan 3-3,5 ton/ha GKP
2. Lama pengeringan 8-10 jam
3. Kebutuhan sekam 300 kg (k.a $\pm 11\%$)
4. Biaya pengeringan dapat ditekan sampai Rp. 20,21/kg
5. Meningkatkan rendemen beras sebanyak 4%
6. Meningkatkan prosentase beras kepala sampai 69,96%
7. Memanfaatkan limbah dan ramah lingkungan
8. Menggunakan bahan bakar alternatif (Bio Energi)
9. Proses pengeringan tidak terkendala dengan cuaca (hujan/malam hari)

*BPTP SumSel

Radio Komunitas.....Sambungan dari hal 9

menjadi lebih paham dan mudah mencerna informasi kebakaran yang diterima dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakatnya dengan format lokal, sehingga masyarakat lebih mengerti informasi yang disampaikan.

Tahun ini, SSFFMP berencana untuk memfasilitasi pengembangan rakom di salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikenal cukup rawan terhadap bahaya kebakaran. Dengan adanya media rakom ini, diharapkan informasi mengenai kebakaran dapat disebarluaskan di desa-desa yang berdekatan sehingga masyarakat lebih paham situasi dan sadar akan bahaya serta dampak kebakaran yang ditimbulkan.

Beberapa informasi kebakaran yang mungkin dapat dimasukkan ke dalam program siaran rakom meliputi informasi mengenai sistem peringkat bahaya kebakaran yang didasari atas perhitungan data cuaca, informasi mengenai lokasi atau kejadian kebakaran hutan dan lahan, status siaga, dampak negatif kebakaran yang ditimbulkan serta himbauan-himbauan terkait dengan penggunaan api dan pencegahan kebakaran.

Untuk mendapatkan informasi mengenai Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) serta status siaga kebakaran, pihak rakom perlu menjalin kerjasama dengan pihak Manggala Agni Daop III Kayuagung yang juga telah mengembangkan sistem pemantauan cuaca otomatis (*Automatic Weather System AWS*). Informasi mengenai jumlah dan penyebaran lokasi hotspot atau titik panas, bisa diperoleh melalui kerjasama dengan Gugus Tugas Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SIKLAH) Dinas Kehutanan Kabupaten OKI.

Selain itu, instansi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, kesehatan, pertanian, peternakan ataupun perkebunan, diharapkan memanfaatkan media rakom untuk penyebarluasan informasi-informasi teknis terkait dengan pembangunan di desa. Sehingga, paling tidak, pelayanan dari pihak pemerintah untuk masyarakat menjadi lebih mudah dan masyarakat menjadi lebih terfasilitasi untuk berkembang. Pada akhirnya semua upaya pembangunan desa diharapkan menjadi lebih terintegrasi dan

*RS-GIS SSFFMP

PPL SwakarsaSambungan dari hal 4

Dalam menjalankan perannya, Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Sukakeswan merupakan mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS sebagai agen dan pendamping pemberdayaan masyarakat petani di desa.

*Comunity Development Specialist SSFFMP

**Tim BPTP Sumsel

Kegiatan SSFFMP

Pelatihan GPS untuk Daops III Manggala Agni Kabupaten Ogan Komering Ilir

SSFFMP bekerja sama dengan Daerah Operasi III Manggala Agni Kabupaten OKI mengadakan pelatihan penggunaan GPS yang telah berlangsung pada tanggal 21-22 Februari. Pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas anggota regu Manggala Agni Daops III dalam menggunakan GPS dan pengolahan data menggunakan komputer yang diikuti oleh 10 orang peserta.

Pelatihan Penyegaran untuk Pelatih Pengendalian Kebakaran dan P3K

SSFFMP mengadakan Pelatihan Penyegaran untuk Pelatih Pengendalian Kebakaran dan P3K berlangsung di Hotel Bumi Asih, Palembang pada tanggal 13-15 Februari 2007. Pelatihan diikuti oleh 24 orang peserta yang berasal dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Polisi Hutan, BKSDA, Manggala Agni, Dinas Kehutanan OKI dan MUBA, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyuasin, PT Musi Hutan Persada, PT. SBA Wood Industries dan PT Golden Blossom Indonesia.

Pelatihan Operator Sistem Informasi tingkat kecamatan

SSFFMP mengadakan pelatihan operator sistem informasi yang dilaksanakan di dua kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Kecamatan Batang Hari Leko berlangsung selama dua hari 24-26 Januari 2007 dan Kecamatan Bayung Lencir pada tanggal 29-31 Januari 2007.

Pelatihan Penyegaran untuk Regu Masyarakat Desa

Pada Bulan Januari dan Februari SSFFMP telah dilakukan pelatihan penyegaran untuk regu masyarakat desa di 3 kabupaten prioritas. Diawali pada tanggal 20-21 Februari pelatihan dilaksanakan di Desa Purwosari Kabupaten Muba dengan 72 peserta dari 8 desa (Epil, Lais, Tanjung Agung Timur, Barat, dan Utara, serta Desa Teluk Kijing I dan II). Pada tanggal 22-23 Februari pelatihan berpusat di dua tempat, pertama di Desa Surya Adi Kabupaten OKI dengan 54 peserta dari 6 desa (Marga Bakti, Jaya Bakti, Catur Tunggal, Sumber Mulya dan Cahaya Mulya) sedangkan di Desa Rantau Sialang (Kabupaten Muba) dengan jumlah peserta 72 orang dari 8 desa (Tebing Bulang, Suka Lali, Kertayu, Pagar Kaya, Talang Mendung, Rukun Rahayu dan Mekar Jaya). Pelatihan berikutnya pada tanggal 26-27 Februari dengan 54 orang peserta dari 6 desa (Mukti Karya, Surya Karta, Bina Karsa, Bina Tani dan Beringin Jaya) yang bertempat di Desa Pematang Suka Kabupaten OKI. Pada tanggal 27-28 Februari di



Desa Beruge (Kabupaten Muba) dengan peserta sebanyak 72 orang dari 8 desa (Sereka, Tanjung Raya, Bangun Sari, Sungai Angit, Pinggap, Pengaturan dan Lubuk Buah).

Lokakarya dan Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Talang Lubuk

SSFFMP bekerja sama dengan *Multistakeholder Forum* Kabupaten Banyuasin mengadakan lokakarya dan pelatihan ekonomi rumah tangga di Desa Talang Lubuk Kecamatan Muara Telang yang berlangsung pada tanggal 15-16 Desember 2006 dan diikuti 15 pasangan suami istri.

Mediasi Tata Batas Desa Muara Medak

Pada tanggal 1 Maret 2006 di kantor Camat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, SSFFMP dan Kelompok Kerja (Pokja) III MSF Kabupaten MUBA mengadakan mediasi Tata Batas Desa Muara Medak. Tujuan kegiatan adalah untuk membuat kesepakatan bersama antara Desa Muara Medak dengan desa-desa sempadan mengenai tata batas desa. Kegiatan diikuti 46 orang antara lain berasal dari tokoh masyarakat, Ketua adat, Camat dan staff Kecamatan Bayung Lencir, Tata Pemerintahan dan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten MUBA. Hasil dicapai dalam kegiatan tersebut adalah adanya kesepakatan mengenai penataan batas desa antara Desa Muara Medak dengan 8 desa sekitarnya.

Pelatihan untuk Pelatih Bagi PPL Swakarsa

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan bekerja sama dengan SSFFMP mengadakan pelatihan untuk pelatih bagi PPL Swakarsa dan Sukakeswan. Kegiatan berlangsung pada tanggal 12-16 Februari di Asrama Haji Palembang diikuti 43 orang peserta.

REDAKSI

Buletin **Hotspot** Volume VIII, Februari 2007

Diterbitkan oleh **South Sumatra Forest Fire Management Project** didukung oleh Komisi Eropa tetapi isi dari buletin ini tidak mencerminkan opini, pandangan, rekomendasi, dan kebijakan Komisi Eropa.

Penanggung Jawab: Co-Director SSFFMP, Dr. Karl-Heinz Steinmann

Redaktur: Mochamad Saleh, Prasetyo Widodo, Muh. Iqbal, Yoga

Design Layout: Mochamad Saleh dan Yoga

Photo-photo : M. Saleh, DR. H. M. Nicolas, Candra D, Adis, Ali Imron, Yoga, Doc SSFFMP.

Alamat Redaksi: South Sumatra Forest Fire Management Project, Jalan Jendral Sudirman No. 2837 KM 3,5 Palembang 30129 Sumatera Selatan. Telp : 0711 377821 Faks : 0711 353176, WebSite : www.ssffmp.or.id, Email : ssffmp.eu@telkom.net